

Pengaruh Pajak Penghasilan dan *Corporate Governance* Pada Manajemen Laba Perusahaan Pertambangan

Kresna Koharwaranto Halimi¹
IG.A.M. Asri Dwija Putri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email : halimi_kresna@yahoo.com / Tlp: +6281 159 959 96

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh pajak penghasilan dan *corporate governance* pada manajemen laba. Model Jones Modifikasian digunakan untuk menghitung akrual diskresioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak berpengaruh pada manajemen laba, artinya tidak adanya hubungan antara pajak penghasilan dengan manajemen laba. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif pada manajemen laba, dimana kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antara anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti jika komite audit meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan pada praktik manajemen laba.

Kata kunci: Manajemen laba, akrual diskresioner, pajak penghasilan, *corporate governance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to test how the income tax and the corporate governance on earnings management. Modifikasian Jones model is used to calculate discretionary accruals. As for corporate governance using a proxy board size and audit committee. Data analysis technique used is the test of normality, heteroscedasticity, multicollinearity, autocorrelation and multiple linear regression analysis. The results showed that the income tax has no effect on earnings management, meaning a lack of correlation between income tax and profit management. Board size no negative effect on earnings management, where such conditions can be due to the difficulty of coordination between the members of the council and it inhibits the supervisory process should be the responsibility of the board of commissioners. The audit committee has a negative effect on earnings management, which means that if the audit committee increased, it will result in a decrease in earnings management practices

Keywords: *Earnings management, discretionary accruals, income tax, corporate governance*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Pada umumnya, manajemen akan memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan (Andreani dan Setiawati, 2015).

Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning per share*). Informasi keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi laba sering menjadi target rekayasa manajemen untuk memaksimalkan kepuasaannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (Ghozali dan Chariri, 2007:350).

Manajemen laba adalah usaha pihak manajer yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias

laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2002).

Pilihan kebijakan akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan pelaporan laba disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba timbul sebagai dampak konflik keagenan yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan daripada pemegang saham. Hal ini memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi pada angka laba yang akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga menyebabkan kesalahan dalam pembuatan keputusan (Andreani dan Setiawati, 2015).

Menurut Scott (2011), pemahaman atas manajemen laba dapat dibagi menjadi dua yakni pertama, melihatnya sebagai perilaku *oportunistik* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*oportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Faktor-faktor yang memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba antara lain, motivasi rencana bonus, kontrak utang jangka panjang, motivasi perpajakan, penawaran saham perdana, penawaran obligasi perdana, dan motivasi politik (Scott, 2011). Motivasi perpajakan merupakan yang paling nyata dilakukan dalam manajemen laba karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan pemerintah menaikkan pajak pendapatan perusahaan tersebut. Manajemen menginginkan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah mempunyai keinginan untuk mendapatkan pajak yang sebesar mungkin sebagai pendapatan pemerintah yang wajib disetor ke negara.

Pada tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang pajak penghasilan yaitu dengan diterbitkan UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang tersebut memberikan insentif dan kemudahan untuk wajib pajak. Salah satu insentif tersebut adalah penurunan tarif pajak, dimana tarif pajak badan mengalami penurunan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu (1) pada tahun 2009 menggunakan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 menggunakan tarif 25%, (2) 5% dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah go publik dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan (3) sesuai dengan UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif nomor (1) atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2006).

Tata kelola perusahaan adalah proses di mana perilaku perusahaan dikendalikan dan diawasi serta kerangka faktual dan hukum mempengaruhi atau mengatur proses ini (Frieze *et al.*, 2006). Tata kelola perusahaan yang baik mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba (Lanis dan Richardson, 2011).

Mekanisme *good corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba. Tujuan dari *good corporate governance* adalah agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder* (Surya *et. al.*, 2008:24). *Good corporate governance* terdiri dari empat komponen, yaitu susunan komite audit, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan dua komponen utama dari *good corporate governance*, yaitu proporsi dewan komisaris dan susunan komite audit.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Semakin besar proporsional jumlah dewan komisaris dan komisaris independen maka semakin besar kemungkinan dapat menghalangi terjadinya manajemen laba (Andreani dan Setiawati, 2015). Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah komisaris independen terhadap jumlah total anggota komisaris.

Susunan komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistiyanto, 2008:156). Susunan komite audit dalam penelitian ini merupakan variabel dummy, apabila perusahaan membentuk susunan komite audit sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia (terdiri dari tiga orang, dipimpin oleh seorang komisaris independen) diberi nilai satu. Apabila tidak sesuai dengan aturan BEI, maka diberi nilai nol.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu kategori perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian karena industri pertambangan termasuk dalam industri *high profile* yang memiliki visibilitas dari *stakeholder*, risiko politis yang tinggi, dan menghadapi persaingan yang tinggi. Industri *high profile* umumnya merupakan industri yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas (*stakeholder*). Sehingga

kemungkinan para manajer dari perusahaan sektor pertambangan melakukan manajemen laba sangat besar karena mereka akan berusaha untuk membuat para investor tetap berinvestasi pada perusahaannya dengan menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan kepentingannya dan menarik investor lain untuk berinvestasi di perusahaannya.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dengan pemegang saham. Konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham yang termotivasi oleh kepentingan masing-masing dan untuk mensejahterakan dirinya (Sunarto, 2009).

Konflik kepentingan semakin meningkat karena pemilik saham tidak dapat memantau kinerja agen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajer telah bekerja sesuai dengan keinginan pemilik saham (Watts and Zimmerman, 1986). Sebagai pengelola, manajer dapat lebih mengetahui keadaan yang ada didalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earning management*) (Richardson, 1998).

Ketimpangan informasi yang terjadi antara manajer dan pemilik saham ini dapat membuka peluang manajer untuk menyajikan informasi yang tidak

sebenarnya kepada pemilik saham dengan tujuan memaksimalkan kepentingannya sendiri, terutama jika informasi yang disajikan tersebut mengenai pengukuran kinerja manajer (Setiyanto dan Rahardja, 2012). Konflik keagenan tersebut tidak terlepas dari perilaku manusia sebagai makhluk individu yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interested behavior*) dalam memenuhi kepentingannya (Eisenhardt, 1989).

Teori akuntansi positif pada prinsipnya berasumsi bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) praktik-praktik akuntansi (Watts dan Zimmerman, 1986). Teori ini mengungkapkan bahwa faktor ekonomi tertentu atau suatu unit usaha tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Perkembangan dari teori akuntansi positif menunjukkan peran penting dalam memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan akuntansi dalam memperkirakan atau menjelaskan konsekuensi akan keputusan yang dibuat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2008). Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan didefinisikan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Soebakir, dkk,1999).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada semua orang secara pribadi (person) dan perusahaan (sebagai subyek pajak) atas semua pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diperolehnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan tersebut meliputi bekerja, berproduksi, berinvestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan atau menambah kemampuan ekonomi (Suratman, 2009).

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan

dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Alasan mengapa harus melakukan koreksi fiskal, karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yuanita (2013) mengungkapkan kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar fungsi *budgeter*, akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Manajemen laba menurut Scott (2011) adalah *“the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”*. Definisi manajemen laba tersebut, manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. Beberapa pihak akademisi menyebutkan manajemen laba sebagai

bentuk kecurangan yang dilakukan manajemen untuk mendapat keuntungan dan kepuasan tersendiri dan sebagai upaya mengelabui *stakeholders* mengenai bagaimana kondisi kinerja perusahaan. Namun bagi pihak lain mengatakan manajemen laba merupakan aktivitas yang sudah biasa dilakukan manajer saat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan cara tertentu yang disengaja dan yang masih dalam batasan prinsip akuntansi. Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor public dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan public), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas. (Sjahdeini, 2000).

Penelitian mengenai *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan shareholders. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok: (1) berupa *internal mechanism* (mekanisme internal) seperti proporsi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif (2) *external mechanisms* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*. (Barnhart & Rosentein 1998). *Corporate governance* sebagai mekanisme pengendali (*diciplinary forces*) yang efektif menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Setiap keputusan manajemen yang diambil didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan *resources* yang ada digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko.

(Klein, 2000) yang menguji karakteristik komite audit dan dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. Klein menggunakan 687 perusahaan besar Amerika yang diperdagangkan secara publik. Peneliti menemukan manajemen laba ada pada perusahaan-perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari anggota *directors independent* lebih kecil dibanding mayoritas *directors independent*.

(Klein, 2000) menyatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen ketika CEO menduduki komite kompensasi dewan, terdapat hubungan negatif antara *abnormal accruals* dengan jumlah komisaris independen yang ada dalam komite audit.

(Peasnell *et al.* 2000) menyatakan dalam penelitiannya, timbulnya manajemen laba di Inggris tergantung pada dewan pengawasan (anggota komisaris independen dan komite audit). Hasil studi ini menunjukkan bahwa kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laba untuk menghindari pelaporan, penurunan *earnings* atau kerugian yang berhubungan negatif dengan pihak luar dalam dewan komisaris. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kontribusi dewan komisaris yang berasal dari pihak luar yakni mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba yang dilakukan manajemen dan dapat menaikkan integritas laporan keuangan. Chtourou *et al.* (2001) melakukan penelitian untuk menginvestigasi pengaruh praktik tata pengelolaan perusahaan yang baik dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit pada praktek manajemen laba melalui *discretionary accruals*. Dengan demikian, hasil studi ini memberikan bukti bahwa dewan komisaris dan komite audit yang efektif akan menghambat tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

(Xie *et al.* 2001) melakukan pengujian terhadap peran dewan komisaris, komite audit, dan komite eksekutif dalam mencegah manajemen laba. Peneliti menggunakan sampel dari indeks S&P 500 ketika terdaftar pada bulan Juni untuk masing-masing tahun 1992, 1994, dan 1996. Sampel yang digunakan sebanyak 282 perusahaan. Siswantaya (2007) berkesimpulan bahwa komisaris independen dan komite audit yang aktif dan memiliki pengetahuan tentang keuangan mungkin menjadi faktor penting dalam pencegahan kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba.

(Yuliana, 2011) mengatakan pajak adalah salah satu beban perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan semaksimal mungkin. Menurut Wijaya dan Christiawan, (2014), menyatakan bahwa salah satu alasan dilakukannya manajemen laba adalah untuk meminimalisasi pajak, maka manajemen akan berusaha untuk menggeser laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Sesuai dengan motivasi dilakukannya manajemen laba yaitu motivasi pajak, maka manajemen sebagai wajib pajak berhak untuk melakukan pemilihan metode yang akan digunakan untuk mengurangi beban pajak (Wijaya dan Christiawan, 2014). Sehingga celah tersebut dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan upaya-upaya penundaan atau mempercepat pengakuan pendapatan dan biaya, sehingga dapat menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan (Setiawati, 2001). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Pajak Penghasilan berpengaruh positif pada praktik manajemen laba.

Yu (2006) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh nilai akrual kelolaanya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit proporsi dewan komisaris maka tindak manajemen laba akan semakin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi pihak manajemen dalam menjalankan perannya.

(Chtourou, *et al.* 2001) juga menyatakan hal yang sama dengan (Yu, 2006), namun dalam penelitian mereka hal ini hanya terjadi pada kasus dimana manajemen laba dilakukan dengan penurunan laba (*income decreasing*), sedang untuk kasus sebaliknya (*income increasing*) hasilnya tidak signifikan. Sementara itu Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu semakin banyak dewan komisaris, maka pembatasan atas tindak manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif pada praktik manajemen laba.

(Chtourou *et al.* 2001) melakukan penelitian untuk menginvestigasi pengaruh praktik tata pengelolaan perusahaan yang baik dilakukan oleh komite audit pada praktik manajemen laba melalui *discretionary accruals*. Sampel dalam penelitian ini dari Compustat tahun 1996. Peneliti menemukan bahwa manajemen laba secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik tata pengelolaan perusahaan dalam komite audit. Studi ini menyimpulkan bahwa komite audit yang lebih efisien dalam mengurangi praktik manajemen laba jika seluruh anggotanya adalah independen dan melakukan pertemuan secara regular.

Carcello *et al.* (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Dengan demikian hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa komite audit yang efektif akan menghambat tindakan praktik manajemen laba

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Susunan komite audit berpengaruh negatif pada praktik manajemen laba.

METODOLOGI PENELITIAN

Data menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas. Penelitian ini dikatakan kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sesuai dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini ingin menjelaskan tentang pengaruh pajak penghasilan, proporsi dewan komisaris, dan susunan komite audit pada praktik manajemen laba.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan, terutama yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas perusahaan-perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive judgment sampling*, yaitu sampel yang pemilihannya dilakukan secara acak yang informasinya diperoleh dengan mempergunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: 1). Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode tahun 2012-2014; 2). Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap yang berakhir per 31 Desember pada periode pengamatan

setidaknya dua tahun sebelumnya. Penggunaan data dua tahun kebelakang dari periode amatan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang menunjang penghitungan nilai dan komponen akrual perusahaan; 3). Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dalam satuan Rupiah.

Penelitian ini dalam melakukan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi. Aplikasi metode observasi dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa angka-angka dalam laporan keuangan, terutama yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas perusahaan-perusahaan sampel, serta teori-teori dan jurnal-jurnal seputar praktik manajemen laba.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan atau tanpa variabel moderator. Analisis ini juga dapat menduga besarnya dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1 statistik deskriptif yang ditunjukkan adalah rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan deviasi standar.

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	45	-0,406	0,383	0,01573	0,110358
X1	45	0,000	18,266	12,91912	4,558682
X2	45	33,333	60,000	41,167	8,783482
X3	45	0	1	0,97	0,181

Sumber: data diolah, 2016

Nilai minimum untuk akrual diskresioner (DA) adalah sebesar-0,40568 pada PT. Radiant Utama Interinsco Tbk dan nilai maksimum adalah sebesar 0,38311 pada PT. Timah Tbk, dengan nilai *mean* sebesar 0,01573 serta deviasi standar sebesar 0,11035. Nilai minimum untuk pajak penghasilan (X1) adalah sebesar 0,000 pada PT. ATPK Resources Tbk dan nilai maksimum adalah sebesar 18,266 pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, dengan nilai *mean* sebesar 12,91912 serta deviasi standar sebesar 4,558682. Nilai minimum untuk proporsi dewan komisaris (X2) adalah sebesar 33,333 pada PT. ATPK Resources Tbk dan nilai maksimum adalah sebesar 60,000 pada PT. Golden Eagle Energy Tbk, dengan nilai *mean* sebesar 41,617 serta deviasi standar sebesar 8,783482. Nilai minimum untuksusunan komite audit (X3) adalah sebesar 0 pada PT. Golden Eagle Energy Tbk dan nilai maksimum adalah sebesar 1 pada PT. ATPK Resources Tbk, dengan nilai *mean* sebesar 0,97 serta deviasi standar sebesar 0,181.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 berikut diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar $0,51 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,35113177
Most Extreme Differences	Absolute	0,114
	Positive	0,114
	Negative	-0,046
Kolmogorov-Smirnov Z		0,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,051

Sumber: data diolah, 2016

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
1	X1	0,979	1,021
2	X2	0,895	1,118
3	X3	0,909	1,100

Sumber: data diolah, 2016

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heterokedastisitas atau mempunyai varian yang homogen. Uji yang dapat digunakan adalah uji *Glejser*. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:139). Tabel 4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	X1	0,992	Tidak terdapat Heteroskedastisitas
2	X2	0,086	Tidak terdapat Heteroskedastisitas
3	X3	0,927	Tidak terdapat Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah, 2016

Tabel 4. memperlihatkan tingkat signifikansi tiap variabel bebas $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya data autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW), apabila nilai Durbin-Watson berada diantara nilai d_U dan $4-d_U$ maka tidak ada gejala autokorelasi.

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.	0,646	0,418	0,386	0,086471	2,003

Sumber: data diolah, 2016

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 5 menunjukkan nilai D-W sebesar 2,003 dengan nilai $d_L = 1,67$ dan $d_U = 1,34$ sehingga $4-d_L = 4-1,67 = 2,33$ dan $4-d_U = 4-1,34 = 2,66$. Oleh karena nilai *dstatistic* 2,003 berada diantara d_U dan $4-d_U$ ($1,34 < 2,003 < 2,66$) maka pengujian dengan Durbin-Watson berada pada daerah tidak ada autokorelasi maka ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 6.
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t-test	Sig. t
X1	021	-0,202	0,841
X2	247	2,293	0,026
X3	528	-4,933	0,000
Konstanta			0,025
R			0,646
R Square			0,418
F _{hitung}			13,386
F _{sig}			0,000
Regresi linear berganda	DA = 0,025 – 0,021(X1) + 0,247(X2) – 0,528(X3) + e		

Sumber: data diolah, 2016

Pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa besarnya nilai *R Square* adalah sebesar 0,418 ini berarti pengaruh variabel pajak penghasilan (X1), proporsidewan komisaris (X2) dan susunan komite audit (X3) pada praktik manajemen laba (DA) sebesar 41,8 persen dan 58,2 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain lain di luar model penelitian.

Pada Tabel 6 dapat dilihat nilai koefisien regresi dari variabel pajak penghasilan (X1), proporsi dewan komisaris (X2) dan susunan komite audit (X3), maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$DA = 0,025 - 0,021(X1) + 0,247(X2) - 0,528(X3) + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka pengaruh variabel pajak penghasilan (X1), proporsi dewan komisaris (X2) dan susunan komite audit (X3) pada praktik manajemen laba dapat diartikan sebagai berikut: 1). Diketahui konstanta besarnya 0,025 mengandung arti jika variabel pajak penghasilan (X1), proporsi dewan komisaris (X2) dan susunan komite audit (X3) dianggap konstan pada angka 0 (nol), maka nilai Y sebesar 0,025; 2). $\beta_1 = -0,021$; berarti apabila variabel pajak penghasilan (X1) meningkat satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,021 persen pada manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan; 3). $\beta_2 = 0,247$; berarti apabila variabel proporsi dewan komisaris (X2) meningkat satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,247 persen pada manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan; 4). $\beta_3 = -0,528$; berarti apabila variabel susunankomite audit (X3) meningkat satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan sebesar -0,528 persen pada manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak *fit*. Oleh karena F_{hitung} sebesar $13,386 > 2,83 F_{tabel}$ dan nilai Sig. F sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Ini berarti variabel pajak penghasilan (X1), proporsi dewan komisaris (X2) dan susunan komite audit (X3) berpengaruh pada variabel praktik manajemen laba.

Untuk melihat pengaruh variabel pajak penghasilan, proporsi dewan komisaris dan susunan komite audit pada variabel praktik manajemen laba, maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji-t. Pada tabel 4.8 dapat dilihat hasil uji-t dengan program SPSS.

Tabel 7.
Hasil Uji-t

No	Variabel	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}
1	X1	-0,202	0,841	-1,683
2	X2	2,293	0,026	1,683
3	X3	-4,933	0,000	-1,683

Sumber: data diolah, 2016

Tabel 7 menunjukkan variabel pajak penghasilan memiliki t_{hitung} sebesar -0,202 dan nilai sig sebesar 0,841. Nilai Sig sebesar $0,841 > 0,05$ berarti variabel pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan pada praktik manajemen laba, oleh karena itu, H_1 ditolak.

Variabel proporsi dewan komisaris memiliki t_{hitung} sebesar 2,293 dengan nilai sig sebesar 0,026. Nilai Sig sebesar 0,026 memiliki nilai lebih kecil dari α 0,05. Koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris sebesar 0,247 yang

dimana menunjukkan arah positif. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa H_1 ditolak.

Variabel susunan komite audit memiliki t_{hitung} sebesar -4,933 dengan nilai sig sebesar 0,000. Nilai Sig sebesar 0,000 memiliki nilai lebih kecil dari α 0,05. Koefisien regresi variabel komite audit sebesar -0,528 yang dimana variabel komite audit menunjukkan arah negatif. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar -0,202 dan nilai Sig. t sebesar 0,841 $>$ 0,05 maka H_1 ditolak. Hal ini berarti variabel pajak penghasilan tidak berpengaruh pada praktik manajemen laba. Nilai *R Square* yang didapatkan dari hasil analisis linier berganda sebesar 41,8 persen, yang dimana berarti terdapat 58,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Salno dan Baridwan (2000) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah bahwa besaran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat dikaitkan dengan praktik perataan laba dengan motivasi menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Perusahaan yang kecil akan lebih cenderung melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran besar, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,293 dan nilai Sig. t sebesar 0,026, dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,247 maka H_2 ditolak. Hal ini berarti variabel proporsi dewan komisaris berpengaruh positif

pada praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007) bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antara anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Selain itu, besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dan efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi, serta peran dewan komisaris dalam aktifitas pengendalian (*monitoring*) terhadap manajemen.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar -4,933 dan nilai Sig. t sebesar 0,000 maka H_3 diterima. Hal ini berarti variabel susunan komite audit berpengaruh negatif pada praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carcello *et al.* (2006) yang menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keahlian susunan komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif dalam menekan praktik manajemen laba.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 1). Hasil penelitian menemukan bahwa pajak penghasilan tidak berpengaruh pada praktik manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan karena

besaran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat dikaitkan dengan praktik perataan laba dengan motivasi menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Perusahaan yang kecil akan lebih cenderung melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran besar, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil; 2). Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif pada praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antara anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris; 3). Hasil penelitian menemukan bahwa susunan komite audit berpengaruh negatif pada praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan karena hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan terbukti efektif dalam menekan praktik manajemen laba.

Saran terhadap penelitian selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan untuk melakukan penelitian dengan rentang waktu data laporan keuangan yang lebih lama, menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak. Selain itu tidak hanya perusahaan sektor pertambangan saja tetapi juga mempertimbangkan sektor lainnya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian dengan menggunakan variabel yang lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap *earning management*, akan lebih baik jika satu variabel namun lebih spesifik, seperti jenis

– jenis pajak lainnya, atau menggunakan bagian dari variabel *Good Corporate Governance* lainnya.

REFERENSI

- Abimanyu, Anggito. 2006. Era Baru Kebijakan Fiskal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Andreani dan Setiawati, 2015. *Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Medean: Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 5. Nomor 01, Oktober 2015. Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil.
- Banz, Rolf, “The Relation Between Return and Market Value of Stocks,” *Journal of Financial Economics*, XXXVIII (1981), 269-296
- Basu, Sanjoy, “The Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-to-Earnings: A Test of the Efficient Markets Hypothesis,” *Journal of Finance*, XXXII (1977), 663-682
- Baysinger, Barry D., and Henry N. Butler, “Corporate Governance and the Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition,” *Journal of Law, Economics, and Organization*, I (1985), 101-124.
- Carcello, Joseph V., Carl W. Hollingsworth, April Klein, and Terry L. Neal. 2006. *Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earning Management*. Available online at www.ssm.com
- Chtourou, SM., Jean Bedard, dan Lucie Courteau. 2001. “*Corporate Governance and Earning Management*.” Working Paper.
- Dechow, Patricia M., R.G. Sloan., and A.P. Sweeney. 1995. *Detecting Earnings Management*. *The Accounting Review* vol 70. No.8 : 193 - 225.
- Eckbo, B. Espen, “Valuation Effects of Greenmail Prohibitions,” *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, XXV (1990), 491-505.
- Effendi, Muh Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eisenhardt, K, M. “*Building Theories from Case Study Research*” *Academy of Management Review* vol. 14, No. 4, pp 532-550, 1989.

- Friese, A., S. Link, and S. Mayer. 2006. *Taxation and corporate governance*. Berlin, Germany: Springer Berlin Heidelberg.
- Ghozali, Imam dan, Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Ed. 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardini, Woro. 2013. *Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ikenberry, David, Josef Lakonishok, and Theo Vermaelen, "Market Underreaction to Open Market Share Repurchases," *Journal of Financial Economics*, XXXIX (1995), 181-208
- Jensen, M. and W. Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, (3), pp: 305-360.
- Jones, J. 1991. *Earnings Management During Import Relief Investigations*. *Journal of Accounting Research*. Vol 29. No. 2 : 193-228.
- Klein, A. 2002. "Audit Committee, Board of Director Characteristic, and Earnings Management".
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar 26-28 Juli 2007.
- Ningsaptiti, Restie. 2010. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- OECD, *Principles of Corporate Governance*. 2004. Organisation for Economic Co-Operation and Development. <http://iasplus.com>.
- Peasnell, K.V. 2000. *Detecting Earnings Management Using Cross Sectional Abnormal Accruals Model*. *Accounting and Business Research*, Vol. 30 No. 4.
- Rahmawati, Andri dan Hanung Triatmoko. 2007. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". Simposium Nasional X.
- Salno, H.M. dan Baridwan. 2000. "Analisis Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) : Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 3 (1):17-34.

- Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*", dalam R.M. Talib Puspokusumo (ed), *Reformasi Hukum di Indonesia: Sebuah Keniscayaan*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory*. Sixth Edition. Canada : Person Prentice Hall.
- Setiyanto, Muchamad Danu dan Rahardja. 2012. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.
- Siswantaya, I Gd. 2007. "Mekanisme *Corporate Governance* dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta" (*tesis*). Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Suratman, E. 2009. *Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis*. Pontianak: Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 125 – 137.
- Surya, I. dan Yustivandana, I. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suryani, Indra Dewi. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Dipenogoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Veronica dan Yulius. 2014. Pengaruh Kompensasi Bonus, *Leverage*, dan Pajak Terhadap *Earning Management* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. *Tax & Accounting Review* Vol.4, No.1, 2014.
- Watts, R. L., J. L., Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
- Xie, Biao dan Wallace N. Davidson III, dan Peter J. Dadalt. 2001. *Earnings Management and Corporate Governance: The role of Board and The Audit Committee, Working Paper, Southern Illinois University, Carbondale, II*.

Yuanita, Indah. 2013. "Pajak Kini dan Pajak Tanguhan".
<http://indahyuanita010492.blogspot.com/2013/01/pajak-kini-dan-pajak-tanguhan.html>

Yuliana, C. 2011. Pengaruh *Leverage*, Pergantian CEO dan Motivasi Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7, No.1*, 134-261.